

# SIKAP DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA

Rahmatiah HL.

*Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

---

## **Abstract**

*Political money is very vulnerable to any election administration, including in legislative elections. This study aims to determine the extent to which attitudes and knowledge society Gowa to money politics. By using a questionnaire as a data collection were analyzed using simple regression analysis. The results show the people of Gowa tend to respond to the politics of money and this situation is conditioned by the stimulus of the candidates, knowledge of politics is low and the economic situation down to the middle is very difficult for the people of Gowa can avoid the politics of money, because it is a requirement unavoidable.*

## **Keywords:**

*Attitudes, Knowledge, Political money*

## **Abstrak**

Politik uang sangat rentan pada setiap penyelenggaraan pemilu termasuk pada pemilu legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sikap dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Gowa terhadap politik uang. Dengan menggunakan kuesioner sebagai bahan pengumpulan data yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasilnya memperlihatkan masyarakat Kabupaten Gowa cenderung merespon politik uang dan situasi ini dikondisikan oleh adanya stimulus dari para calon legislatif, Pengetahuan politik yang rendah dan keadaan ekonomi menengah ke bawah sangat sulit bagi masyarakat Kabupaten Gowa dapat terhindar dari politik uang, karena hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

## **Kata Kunci:**

Sikap, Pengetahuan, Politik uang

## A. PENDAHULUAN

**D**emokrasi yang telah dibangun seharusnya berjalan tanpa ada gangguan akan menghasilkan suatu system yang demokratis di dalam masyarakat, namun bila dibangun sebagai ajang politik praktis tidak beretika maka sama saja dengan membangun rumah di atas pasir. Pemerintah seharusnya berfikir kritis dan membuat kebijakan-kebijakan hukum yang efektif untuk memberantas perilaku *money politic* demi meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa adanya *money politic*, menindak tegas pelaku-pelaku yang melakukan praktek *money politic* agar tercipta rasa takut untuk melanggar aturan tersebut dan menjamin hak setiap warga Negara menyalurkan aspirasinya tanpa gangguan dan pengaruh dari luar. Sehingga dengan demikian pertumbuhan partisipasi rakyat dalam hal politik akan meningkat.

Bagi warga Negara dengan pengetahuan politik yang rendah dan keadaan ekonomi menengah ke bawah akan sangat sulit bagi mereka agar terhindar dari *money politic*, karena hal tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Disadari atau tidak semakin maraknya *money politic* di dalam masyarakat sehingga masyarakat semakin pasif terhadap kehidupan berpolitik dan bahkan cenderung acuh. Hal ini didorong oleh pelaku para calon pemimpin Negara yang menjamur kemunculannya dan bertarung demi memperoleh suara terbanyak dan menhadi pemenang dan tidak mengedepankan aspek demokratis aktif. Mereka para calon pemimpin melakukan berbagai macam cara agar menjadi pemenang dalam pemilihan dengan mengorbankan harta bendanya untuk membeli suara rakyat. Padahal disadari atau tidak merekalah bibit-bibit koruptor. Pada akhirnya *money politic* menjadi ajang yang sudah layak dan lazim dilakukan setiap kali ada pemilu /pemilukada di dalam masyarakat tanpa adanya pencegahan atau penindakan dari masyarakat itu sendiri dan pemerintah.

*Money politic* sangat rentan di setiap even Pilkada, termasuk Pilgub Sulsel. Peneliti Indonesia Quick Research (*Inquire*) Institute, Ardi Arsyad jauh-jauh hari melansir survei yang dilakukannya dari 2009 hingga 2012, menunjukkan pengaruh uang dalam politik masih mendominasi, karena setiap tahunnya mencapai angka 20 persen. Sehingga Ardi menganggap kalau pada Pilgub Sulsel besar kemungkinan *money politik* akan tetap ada, bahkan akan menyentuh 22 persen jumlah pemilih di Sulsel. Sehingga, Direktur Riset *Inquire* Institute ini menyatakan politik uang adalah bagian dari kriminalisasi demokrasi. Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No 3 tahun 1999 jelas-jelas melarang adanya *money politic*. Fenomena ini cenderung memanfaatkan Pemilukada kepala daerah sebagai ajang mendapat keuntungan sesaat.<sup>1</sup>

Hasil penelitian Pilgub 2007, memperlihatkan fenomena *money politik* bermain di angka Rp100-150 ribu per suara. Fenomena angka pada Pilgub Sulsel 2013 bermain di angka Rp200-500 ribu untuk satu suara sehingga calon gubernur akan

---

<sup>1</sup> <http://rakyatsulsel.com/gowa-jadi-sasaran-empuk-money-politic-pilgub.html>

menyiapkan anggaran cukup besar untuk melakukan serangan fajar.<sup>2</sup> Peneliti ini mengingatkan, bahwa akan terjadi fenomena *money politic* pada kalangan masyarakat menengah, utamanya di pelosok daerah, dimana Sasarannya adalah mereka yang berpenghasilan hidupnya di dapat dari hasil pertanian, peternakan yang jauh berbeda dengan apa yang diterimanya sehari-hari.

Realitasnya, para calon wakil rakyat hanya merakyat pada saat masa kampanye saja, mendekati rakyat untuk mengambil hati rakyat dan ketika datang waktunya pemilihan umum, mulailah tradisi yang sering disebut "*money politic*" di pagi hari. Akan tetapi, dari permasalahan ini, tidak bisa selalu menyalahkan para calon wakil rakyat yang menggunakan trik *money politic*, seharusnya sebagai masyarakat harus berfikir lebih pintar bagaimana menyikapi dan berfikir lebih logis terhadap fenomena ini. Banyaknya masalah yang berkaitan dengan *money politic* adalah salah satu bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan oentingnya suara mereka sebagai pemilih menimbulkan keprihatinan mendalam, dimana masyarakat sekarang sudah menjadi masyarakat yang apatis terhadap pemerintah.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji secara mendalam untuk melihat sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap *money politic*, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan pengetahuan masyarakat dalam menilai *money politic*. Berdasar alasan itulah maka penulis berangkat pada masalah "Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap *money politic* pada pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa?" dan "Bagaimanakah pengetahuan masyarakat terhadap *money politic* pada pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa?"

## B. KERANGKA TEORI

### 1. Money Politic

Teori Karl Max memusatkan pada masalah-masalah ekonomi yang tak lain adalah masalah kapitalisme. Namun bagi Sammel, masalah-masalah tersebut tidak lain adalah masalah kapitalisme namun merupakan bagian dari tragedy universal, meningkatnya ketidakberdayaan individu ketika terjadi pertumbuhan kebudayaan obyektif.

Dalam pengamatan Simmel, manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan utama, padahal sebetulnya uang hanya merupakan sarana. Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negatif terhadap individu, seperti sinisme. Dampak ekonomi lainnya adalah reduksi nilai-nilai dalam kehidupan manusia, misalnya: banyak manusia yang menilai sesuatu banyak berdasarkan uang, dan menganggap uang adalah segala-galanya. Selain menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel juga menegaskan semua yang terkait dengan uang termasuk dampak negative nya juga tergantung pada manusia itu sendiri. Akan

---

<sup>2</sup> <http://rakyatsulsel.com/gowa-jadi-sasaran-empuk-money-politic-pilgub.html>

tetapi dia juga mengatakan bahwa uang hanyalah sarana, bukan tujuan utama.

Sammel menurunkan 2 teori, yaitu: teori sosiabilita, dan teori Sosiasi.

a. Teori Sosiabilita adalah;

Interaksi yang terjadi demi interaksi itu sendiri dan bukan untuk tujuan lain. Harapan dari diadakannya silaturahmi ke daerah-daerah yaitu terjadinya interaksi antara calon dan masyarakat, tetapi interaksi tersebut tidak terbatas pada masalah praktis sehari-hari. Mereka tidak memiliki "isi" kehidupan sehari-hari yang sama, hubungan mereka karena kehadiran mereka bersama yang sementara sifatnya

b. Teori Sosiasi;

Proses dimana masyarakat itu terjadi yang meliputi interaksi timbal balik dimana individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga masyarakat itu muncul. Namun demikian, proses sosiasi bermacam-macam, mulai dari pertemuan sepintas lalu antara orang-orang asing di tempat-tempat umum sampai ke ikatan persahabatan yang lama dan intim. Masyarakat ada (pada tingkatan tertentu) dimana dan apabila sejumlah individu terjalin melalui interaksi dan saling mempengaruhi.

Seorang calon pemimpin legislatif/eksekutif biasanya didukung oleh partai-partai koalisi yang mengusung mereka. Semakin besar dan kuat partainya, maka dukungan terhadap calon tersebut kemungkinan akan lebih besar daripada partai lain yang berjumlah sedikit. Seorang calon bisa diusung oleh lebih dari 1 partai politik untuk lebih memperkuat dukungan, misalnya 2 atau 3 partai yang akhirnya berkoalisi untuk berjuang memenangkan pemilihan.

## 2. Sikap (*attitude*)

Salah satu ahli psikolog sosial Newcomb, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

- a. Menerima (*receiving*)
- b. Merespon (*responding*)
- c. Menghargai (*valuing*)
- d. Bertanggung jawab (*responsible*)

## 3. Pengetahuan

a. Pengertian

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari pengealaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari

oleh pengetahuan.

b. Komponen-komponen Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo, pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu:

- 1) Tahu (*know*)
- 2) Memahami (*comprehension*)
- 3) Aplikasi (*application*)
- 4) Analisis (*analysis*)
- 5) Sintesis (*synthesis*)
- 6) Evaluasi (*evaluation*)

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa.

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773<sup>o</sup> Bujur Barat dan 120.0317<sup>o</sup> bujur Timur. 5.0829342662<sup>o</sup> Lintang utara dan 5.577305437<sup>o</sup> Lintang selatan. Kabupaten yang berada di sebelah selatan dari Sulawesi Selatan yang merupakan daerah otonom disebelah utaranya berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten Maros. Di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar dan Jeneponto, sedangkan di baratnya dengan kota Makassar dan Takalar.<sup>3</sup>

Wilayah administrasi kabupaten Gowa terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu: Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu. Dari total luas kabupaten Gowa 35,30 persen merupakan kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu.<sup>4</sup>

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Gowa Dalam Angka*, 2014. h. 1

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Gowa Dalam Angka*, 2014. h. 2

berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang.

Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, dimana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.<sup>5</sup>

Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen dari total jumlah penduduk kabupaten Gowa sebesar 652.329 orang.

## 2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah penduduk kabupaten Gowa yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah mereka yang menjadi pemilih pemula, pemilih tetap, dan pemilih sementara dimana jumlahnya sudah ditetapkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang.

Karakteristik responden yang diteliti dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, status pernikahan, status dalam pemilihan umum, pekerjaan, dan penghasilan. Semua informasi mengenai hasil penelitian dan informasi responden tersebut diperoleh dari hasil distribusi kuesioner yang diperoleh kembali untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud.

Dari jenis pekerjaan responden kebanyakan responden berprofesi sebagai wiraswasta yaitu yaitu 45 responden (25%), dimana kategori ini mencakup para ibu rumah tangga dan para pekerja yang tidak terikat oleh perusahaan ataupun orang lain. Sedangkan 37 responden (20,6%) yang memiliki pekerjaan swasta, artinya 37 responden ini ikut dan diatur pekerjaannya oleh perusahaan atau orang tertentu. Hanya 35 responden (19,4%) yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana tata tertib dan aturan keprofesiannya diatur oleh Negara. Hal ini memperlihatkan bahwa betapa sebagian besar masyarakat kabupaten Gowa masih menggantungkan nasib dan hidupnya pada perusahaan atau orang untuk menyambung hidupnya,

---

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Gowa](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa)



entah disebut buruh, sopir ataupun kerja rumahan.

Karakteristik responden yang ditampilkan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi nyata responden sehingga mempermudah dalam menganalisis hasil sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap *money politic*.

### 3. Pembahasan dan analisis

Sikap dikomposisikan sebagai komponen perasaan yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*Unfavourable*) pada suatu objek.

Sikap juga dikomposisikan sebagai kepercayaan, opini, tindakan, dan perhatian yang bersangkutan pada produk atau jasa. Komponen berikutnya adalah kepercayaan dan perasaan terhadap obyek tertentu.<sup>6</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan keseluruhan evaluasi seseorang dari obyek yang ditentukan oleh kepercayaan dan perasaan seseorang.

Secara sederhana sikap didefinisikan sebagai Ekspresi sederhana dari *suka atau tidak suka, mendukung atau tidak mendukung* terhadap objek tertentu, dan jika penulis hubungkan dengan kajian ini maka sikap adalah perasaan responden terhadap *money politic*, perasaan mendukung, perasaan kurang mendukung dan perasaan tidak mendukung pada pola kerja para caleg dalam “menebar pesona” lewat *money politic*.

Sebagaimana dirumuskan dalam formula sikap dari teori terdahulu yaitu diindikasikan sikap masyarakat terhadap *money politic*, kategorinya dilakukan dengan cara simpangan baku (*standar deviation*), yaitu membagi data menjadi tiga kategori;

- (1) Mendukung, bila  $x > \bar{x} + SD$ .
- (2) Kurang Mendukung, bila  $\bar{x} - SD \leq X \leq + SD$ .
- (3) Tidak mendukung, bila  $x < \bar{x} - SD$ <sup>7</sup>

Keterangan:

X = nilai yang diperoleh

$\bar{x}$  = nilai rata-rata

---

<sup>6</sup> Umar, Husein, *Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147

<sup>7</sup> Muslimin kara, *Statistik Ekonomi*, (Makassar: UIN alauddin Press, 2013), h.34

Tabel 1  
Sikap Masyarakat terhadap *Money Politic*

			Respon terhadap money politik			Total
			merespon	kurang merespon	tidak merespon	
Kategori sikap	mendukung	Count	13	30	2	45
		% within kategori_sikap	28.9%	66.7%	4.4%	100.0%
Kategori sikap	kurang	Count	37	76	14	127
	mendukung	% within kategori_sikap	29.1%	59.8%	11.0%	100.0%
Kategori sikap	tidak	Count	1	4	3	8
	mendukung	% within kategori_sikap	12.5%	50.0%	37.5%	100.0%
Total		Count	51	110	19	180
		% within kategori_sikap	28.3%	61.1%	10.6%	100.0%

Sumber: Hasil output SPSS, 2015

Tabel 3.5, memperlihatkan betapaun sikap masyarakat kurang mendukung *money politic*, namun jumlahnya begitu fantastis karena meski kurang mendukung *money politic* akan tetapi ada 37 responden (29,1%) merespon, artinya pada kategori inilah yang terbanyak merespon *money politic* dengan kata lain meski kurang setuju dengan perilaku para calon legislatif yang melakukan *money politic* tetapi kalau diberi mereka ambil. 76 responden (59,8%) kurang merespon *money politic*, pun juga bila berhadapan dengan uang, sembako, atau bentuk semacamnya mereka pun ambil akan tetapi untuk mendukung belum tentu sebab masyarakat ini sudah cerdas dan sudah mulai memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan apa yang seharusnya ia tidak lakukan. Fakta tersebut di atas didukung oleh data ketika peneliti melakukan wawancara dan *Fokus Group Discussion* (FGD) di salah satu kecamatan di kabupaten Gowa, salah seorang berpendapat, "*doe'na kuallei iyya, mingka belum tentu kupilei, ka apa naissengangi punna lalamma di bilika ma' coblos*".<sup>8</sup> Selebihnya adalah 14 responden (11,0%) tidak merespon *money politic* pun sama dengan kategori sebelumnya yaitu kurang mendukung.

Pada kategori berikutnya adalah tidak mendukung, dan juga tidak merespon *money politic* sebanyak 3 responden (37,7%), pada kategori ini jelas terlihat keexisan dan keistiqamahannya sebagian masyarakat kabupaten Gowa, yang masih punya keyakinan bahwa merepon *money politic* adalah perbuatan tidak terpuji dan arena responden ini menolak *money politic*. Namun sayangnya masyarakat kita pada sikap seperti ini belum terlalu banyak dan selebihnya mereka mementingkan kebutuhan dan sekejab. Saat wawancara ada responden berpendapat, "*dosaki nak, punna ni allei doe'na nampa tena ni pilei, jadi bajikangngai tena niallei passarena*".<sup>9</sup> Sikap responden ini mencerminkan perilaku pemilih yang semakin terlihat rasional dan tetap

<sup>8</sup> Wawancara, di kecamatan Barombong, kabupaten Gowa, tanggal 7 September 2015.

<sup>9</sup> Wawancara, di kecamatan Bontonompo, kabupaten Gowa, tanggal 6 September 2015.



mengedepankan moral dan etika sebagai ummat yang beragama.

Islam telah memberikan rambu-rambu dalam kehidupan dunia politik dan hukum, dengan salah satu hadis al Bukhary di bawah ini.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَّغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ

Artinya:

Dari Abu Humaid al-Sa'diy ra. bahwasanya ia mengabarkan, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang petugas. Maka petugas tersebut datang kepada beliau ketika selesai melaksanakan tugasnya. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, ini untukmu dan ini dihadiahkan untukku.' Maka Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu, lalu tunggu saja apakah engkau akan diberi hadiah atau tidak?" Kemudian Rasulullah saw. berdiri perlahan-lahan setelah shalat. Lalu beliau bersyahadat dan memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, setelah itu beliau bersabda: "Maka bagaimana dengan keadaan seorang petugas yang kami tugaskan, lalu dia datang kepada kami kemudian berkata, 'Ini dari pekerjaanmu, dan ini dihadiahkan kepadaku.' Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya lalu menunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak? Maka demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidak ada salah seorang di antara kalian yang melakukan ghulul (penyelewegan) dari harta sedekah sedikit saja, kecuali ia pasti akan datang pada Hari Kiamat dengan membawa di lehernya. Jika barang itu berupa seekor unta, ia akan membawanya sambil unta itu bersuara. Dan jika barang tersebut berupa seekor sapi, ia akan membawanya sambil sapi itu bersuara. Dan jika barang tersebut berupa seekor kambing, ia akan datang membawanya sambil kambing itu bersuara, maka sungguh aku telah menyampaikannya." <sup>10</sup>

Sebaliknya ada 1 responden (12,5%), yang meski tidak mendukung akan tetapi menerima *money politic* bila diberi. Juga 4 responden (50,6%) kurang lebih sama dengan kategori sebelumnya, yaitu meski menolak *money politic* tetapi bila diberi, maka ia ambil. Hasil wawancara mendukung data tersebut dengan adanya

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Yafii al-Bukhariy, *Shahih Bukhary*, kitab *al-ayman wa al-nudzr*, bab *kaifa kanat yamin al-nabiy shalla Allah 'alaih wa sallam*, hadis no. 6145, 6464, 6639, 6658.

anggapan sebagian masyarakat, “anugerah” (*anu geratis*= sesuatu yang di dapat tanpa keluar keringat dan tanpa ongkos).<sup>11</sup>

Kategori selanjutnya adalah 13 responden mendukung (28,9%) dan merespon *money politic*. Kategori ini sama dengan kategori kurang mendukung akan tetapi merespon *money politic*, kebutuhan sesaat dan pemenuhan keinginan sementara yang diperoleh dari para caleg menggambarkan betapa masyarakat kabupaten Gowa masih berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah, dan kenyataan ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menjual-beli suara. Hal yang sama juga terjadi pada sebagian responden, yaitu sebanyak 30 responden (66,7%) kurang merespon *money politic* akan tetapi tetap mendukung dengan kata lain bila diberi *money politic* diambil meski mereka tahu bahwa hal tersebut melanggar etika dan moral. Sebaliknya hanya 2 orang responden (4,4%) yang tetap *consist* tidak merespon *money politic* meskipun bersikap mendukung, mungkin karena kebutuhan akan tetapi untuk mengambil pemberian “gratis” dari caleg tetap ia tolak.<sup>12</sup>

Sikap responden pada masyarakat kabupaten Gowa memperlihatkan pola perilaku, tendensi, ataupun kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial yang telah dikondisikan. Hal ini terlihat pada hasil penelitian dengan berbagai kategori yang ditampilkan, secara keseluruhan pola perilaku masyarakat kabupaten Gowa masih cenderung merespon *money politic* dan situasi ini dikondisikan oleh adanya stimulus dari para calon legislatif, atau dari tim sukses, atau bahkan memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh pemuda di daerah tersebut.

Uraian di atas, dapat digeneralisasi lewat teori sikap yang dikemukakan oleh Rudman, Wilson, Lindsey dan schooler,<sup>13</sup> dalam *Psikology jilid 1*, bahwa sikap bersifat *eksplisit* dan *implisit*. Sikap juga dapat berubah ketika ada pengalaman baru, dan terkadang berubah karena adanya anggapan bahwa perilaku seseorang itu salah. Tetapi sikap juga dapat berubah karena adanya kebutuhan psikologis akan konsistensi dan bias-bias yang biasanya terjadi dalam mengolah informasi. Akan halnya sikap masyarakat kabupaten Gowa, mencerminkan adanya perubahan pola tingkah laku dalam memutuskan baik tidaknya atau merespon atau menolak, terkadang dihubungkan dengan informasi yang didapat dan bias-bias terkadang menguntungkan responden meski sifatnya hanya sesaat.

Sekelompok peneliti meneliti kemungkinan afiliasi politik menurun dari gen, dengan mengambil dua sampel besar yang berisikan lebih dari 8000 anak kembar yang telah menjalani survei mengenai kepribadian, kepercayaan religi, dan sikap politis. Penemuannya bersifat provokatif, akan tetapi sangatlah penting untuk tidak mengoversimplifikasikan hasil temuannya, dengan salah mengasumsi bahwa opini politik setiap orang sudah ada di otak mereka sejak lahir dan tak terpengaruhi oleh kejadian apapun yang mereka alami. Faktanya adalah faktor yang bertanggung

---

<sup>11</sup> Wawancara, di kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, tanggal 6 September 2015.

<sup>12</sup> Wawancara, di kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa, tanggal 6 September 2015.

<sup>13</sup> Carole Wade dan Carol Tavris, *Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 295.

jawab atas lebih banyak lagi variasi dalam sikap politik, dibanding dengan faktor keturunan, yaitu pengalaman hidup seseorang, atau dengan kata lain faktor genetika perilaku sebagai *nonshared environment*.<sup>14</sup>

Sikap masyarakat dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

1. Sumber dari Pesan (*komunikator*); dapat berasal dari seseorang, kelompok, institusi.
2. Pesan, suatu penelitian telah memusatkan pada apakah strategi rasional atau emosional yang lebih efektif? Pesan dirancang dengan menggunakan kata-kata dan symbol-simbol yang menyampaikan informasi yang membujuk (*persuasive dan rasional*) rupanya dapat mengubah sikap seseorang.
3. Perantara; faktor perantara atau teknologi digunakan untuk menyampaikan pesan politik. Televisi dianggap memperlihatkan citra yang hidup, dianggap sebagai perantara yang kuat dari pada media cetak lainnya untuk mengubah sikap.
4. Sasaran (Pendengar); usia dan kekuatan sikap merupakan dua karakteristik pendengar yang menentukan apakah pesan akan efektif. Orang-orang yang lebih muda lebih mungkin mengubah perilaku mereka dari pada yang lebih tua. Sikap yang lebih lemah pada pendengar membuat perubahan sikap lebih mungkin dari pada yang memiliki sikap yang kuat.<sup>15</sup>

Keempat faktor tersebut di atas, memberikan informasi bahwa dalam melancarkan aksi *money politic* para caleg mampu mengubah sikap masyarakat. Komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tidak mereka memanfaatkan komunikator yang kredibilitasnya berpengaruh pada daya persuasive apalagi ditambah dengan adanya daya Tarik dari komunikator, membuat pesan akan mudah terealisasi dan masyarakat akan mudah terpengaruh.

Cara lain yang tak kalah alotnya adalah isi pesan yang disampaikan yaitu dirancang dengan menggunakan kata-kata atau symbol-simbol dengan harapan orang akan percaya, membentuk sikap dan terhasut dengan apa yang dikatakan tanpa melihat faktanya, dan akan bertambah daya tariknya bila memanfaatkan media televisi . anak- anak atau orang yang berpendidikan rendah sebagai Sang penerima pesan akan lebih mudah dipengaruhi dari pada yang berpendidikan tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat grafik 2.3, tentang tingkat pendidikan responden. Terdapat 92 responden (51,1%) berpendidikan menengah dimana mereka hanya duduk dibangku SMP sederajat dan SMA sederajat. 52 responden (28,9%) berpendidikan dasar. Selebihnya berpendidikan tinggi. Mereka ini mudah dipengaruhi dan terhasut sehingga meski kurang mendukung *money politic* akan tetapi terdorong oleh factor lain sehingga meski tidak merespon ataupun kurang merespon tetap mengambil dan memanfaatkan *money politic* bila diberi.

---

<sup>14</sup> Carole Wade dan Carol Tavris, *Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 297

<sup>15</sup> Laura A. King, *Psikologi Umum, Sebuah Pandangan Apresiatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 187-188.

Variabel lain yang dibahas selanjutnya adalah “pengetahuan”. Aspek Pengetahuan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah: pengetahuan (tahu) tentang istilah *money politic*, Pengetahuan (tahu) bentuk-bentuk *money politic*, dan pengetahuan (tahu) tentang adanya larangan merespon *money politic*, pengetahuan tentang calon legislatif yang datang bersosialisasi di wilayahnya. Kriteria pengetahuan tersebut diukur dan diolah dengan menggunakan hasil ukur: **tinggi, sedang dan rendah.**

Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan tabel 3.6, Di bawah ini untuk kemudian diinterpretasikan dalam bentuk narasi. Sebagai berikut:

Tabel 2  
Pengetahuan masyarakat terhadap *money politic*

		Respon terhadap money politik			Total	
		merespon	kurang merespon	Tidak merespon		
Tingkat pengetahuan	tinggi	Count	18	18	3	39
		% within tingkat_pengetahuan	46.2%	46.2%	7.7%	100.0%
	sedang	Count	32	92	15	139
		% within tingkat_pengetahuan	23.0%	66.2%	10.8%	100.0%
	rendah	Count	1	0	1	2
		% within tingkat_pengetahuan	50.0%	0.0%	50.0%	100.0%
Total	Count	51	110	19	180	
	% within tingkat_pengetahuan	28.3%	61.1%	10.6%	100.0%	

Sumber: Hasil output SPSS, 2015

Tabel 3.6, memperlihatkan bahwa 92 responden (66,2%) kurang merespon *money politic* dan memiliki pengetahuan sedang, 32 responden (23,0%) merespon *money politic* pun berpengetahuan sedang. 18 responden ditempatkan yang sama pada kategori pengetahuan tinggi merespon *money politic* masing-masing 46,2%. Hanya 3 responden (7,7%) berpengetahuan tinggi menolak *money politic*. Ini menandakan bahwa tingkat pengetahuan responden belum mampu meredam alotnya *money politic* di daerah ini. Sebab dari tabel tersebut menggambarkan bahwa tingginya pengetahuan respon terhadap *money politic* bukan alasan untuk menolak *money politic*. Sebaliknya meski berpengetahuan rendah, ternyata tidak merespon *money politic* namun nilainya sangat minim yaitu hanya 1 orang responden (50,0%).

Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan responden, maka tidak mengherankan jika pengetahuan tentang *money politic* diketahui oleh responden pada tingkat pendidikan tinggi, begitupula pada tingkat pendidikan menengah. Pada kategori ini adalah lahan para caleg dimana pengetahuan mereka tentang *money politic* belum terintegrasi dan bahkan belum punya pilihan terhadap caleg tertentu, sehingga lebih mudah dipengaruhi dengan *money politic*. Sedangkan

responden yang berpendidikan rendah, secara mutlak menolak *money politic*, dengan alasan “*tana kkulle ni alle barang-barang passarena saba’ niya ero’na*” na larangki *agamayya*.<sup>16</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang *money politic* masih terbatas pada lingkungan akademik, ditambah kurangnya peranan dan sosialisasi para praktisi politik tentang bahaya dan dampak *money politic* bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung caleg tertentu seharusnya mengingatkan pula bahwa pilihan atau suara tidak dapat diperjual-belikan sebab akan medonai demokrasi.

Hal yang menarik dikaji adalah belum menyeluruh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan belum tuntasnya sosialisasi tentang *money politic* di daerah yang tergolong dataran tinggi dan terpencil. Kedua kategori daerah ini sangat “virgin”<sup>17</sup> sentuhan *money politic*, bahkan pengetahuan tentang *money politic*, belum sampai pada mereka. Hal lain adalah para calon legislatif umumnya menyentuh masyarakat kabupaten Gowa dan melakukan sosialisasi pada daerah yang mudah dijangkau kendaraan roda 4 (empat), terbukti dengan hasil FGD dan amatan langsung peneliti tidak melihat adanya spandul atau symbol-simbol pemenangan calon tertentu pada kedua daerah ini. Sebaliknya yang mampu dicapai kendaraan roda 4 (empat) seperti kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pallangga, Pattallassang, Parang Loe, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan merupakan daerah yang mudah tersentuh *money politic*.

Penerapan sanksi hukuman yang melakukan sebaran *money politic* dan meresponnya pun belum tersosialisasi dan belum ada responden yang mengetahui dengan pasti bahwa mereka yang melakukan *money politic* (baik oleh timnya atau oleh caleg yang bersangkutan) dikenakan sanksi sesuai Undang-undang. Keterangan ini diperoleh berdasarkan wawancara dan FGD yang peneliti lakukan di Kecamatan se-kabupaten Gowa. Pada hal jauh sebelumnya Rasulullah SAW, telah mengingatkan sahabat dan kita semua dengan sabdanya di bawah ini:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ  
 الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ  
 عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya:

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa yang kami pekerjakan dalam suatu pekerjaan lalu kami beri gaji padanya, maka apa yang diambil setelah itu adalah ghulul (korupsi).”<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Wawancara dan FGD di kecamatan Bontonompo, kabupaten Gowa, tanggal 6 September 2015.

<sup>17</sup> Wawancara di kecamatan Tombolo Pao, Parigi dan Tinggi Moncong, tanggal 8 September 2015.

<sup>18</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al Asy’ats bin Ishaq As-sijistani, kitab *al-kharraj wa al-imarah wa al-fay*, bab *fi azraq al-amal*, hadis no. 2554



Lebih jelas lagi pada sabda Rasulullah SAW, berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya:

Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw. melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogokan dalam masalah hukum.<sup>19</sup>

Pengetahuan politik yang rendah dan keadaan okonomi menengah kebawah sangat sulit bagi mereka dapat terhindar dari *money politic*, karena hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Disadari atau tidak semakin maraknya *money politic* di dalam masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang pasif terhadap kehidupan berpolitik dan cenderung untuk acuh pada politik. Hal ini semakin di dorong oleh perilaku para calon legislatif yang semakin tidak dapat dikendalikan menyebabkan mereka melakukan segala strategi agar dapat menjadi seorang pemenang dalam sebuah pemilihan, termasuk mengorbankan harta bendanya agar bisa membeli suara rakyat.

Bagong Suyanto, salah seorang pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, Surabaya, berpendapat bahwa, maraknya berbagai praktik yang diduga *money politic* di pilkada menunjukkan ketidakpercayaan calon kepada dirinya sendiri. Karena tidak yakin programnya diterima, mereka berusaha menarik perhatian masyarakat dengan cara lain, yaitu politik uang. Sasaran *money politic* ini terutama pemilih dari kelas menengah ke bawah yang belum menentukan pilihan. Hal senada juga diutarakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (Guru Besar Universitas Airlangga), Kelas menengah ke bawah diyakini akan lebih mudah dipengaruhi uang. Keyakinan ini bukanlah tanpa alasan. Sebab, demokrasi membutuhkan masyarakat yang mandiri, baik secara ekonomi maupun ideologi.<sup>20</sup> Pendapat kedua pakar tersebut di atas, merupakan gambaran betapa demokrasi belum berjalan baik, demokrasi yang telah dibangun semestinya tanpa ada gangguan, sehingga nantinya akan terwujud suatu sistem didalam masyarakat yang demokratis. Oleh karena itulah pemerintah seharusnya berfikir kritis dan juga membuat kebijakan-kebijakan atau tindakan hukum yang efektif sehingga berpengaruh terhadap berubahnya perilaku *money politics* yang ada dalam masyarakat. Kebijakan ini tentunya menyangkut sosialisai politik demi meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa adanya *money politic*, penindakan tegas bagi pelaku agar terciptanya rasa takut untuk melanggarnya serta menjamin hak setiap warga ngaranya agar dapat mengaspirasikan pendapatnya tanpa adanya pengaruh dari luar. Dengan begitu hal tersebut akan mendukung

---

<sup>19</sup> Abu Isa Muhammad bin Surah Al-Turmudzi, kitab *al-ahkam*, bab *ma ja'a fi al-rasyi wa al-murtasyi fi al-hukm*, hadis no. 1256

<sup>20</sup><https://artikelpolitik.wordpress.com/2008/07/21/perilaku-pemilih-politik-uang-dan-demokrasi-kita/> diakses pada hari selasa, tanggal 20 Oktober 2015.



pertumbuhan partisipasi rakyat dalam kehidupan berpolitik demi kesejahteraan masyarakat. Karena *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau menyuap seseorang yang memiliki hak pilih agar tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan maupun supaya menjalankan hak pilihnya dengan cara tertentu pada saat perhelatan pemilihan umum berlangsung. Perbuatan ini adalah tindak pidana pemilu, pelaku bisa ditindak selama enam bulan atau lebih. Dasar hukumnya adalah pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 yang berbunyi: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman pidana penjara tiga tahun. Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap atau janji berbuat sesuatu.

Partisipasi masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum pun memiliki peranan yang sangat penting. Maka jika pada suatu masyarakat memiliki pendidikan politik yang tinggi, namun tidak memiliki penegak hukum dan masyarakat yang bebas suap, maka bisa dikatakan bahwa keadaan politik di dalam suatu negara tidaklah stabil. Karena semua komponen harus bekerjasama agar dapat terciptanya tatanan politik yang bersih, bebas suap atau *money politic*.

#### D. PENUTUP

1. Sikap masyarakat kabupaten Gowa cenderung merespon *money politic* dan situasi ini dikondisikan oleh adanya stimulus dari para calon legislatif, atau dari tim sukses, atau bahkan memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh pemuda di daerah tersebut.
2. Pengetahuan politik yang rendah dan keadaan ekonomi menengah kebawah sangat sulit bagi masyarakat kabupaten Gowa dapat terhindar dari *money politic*, karena hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

#### Daftar Pustaka

- A. King, Laura. *psikologi Umum (Sebuah Pandangan apresiatif)*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Azwar, Saifuddin. *Seri Psikologi Sikap manusia: Teori Dan pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Agung Nugroho, Bhuono. *Strategi jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS* Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- al-Bukhariy, *kitab al-ayman wa al-nudzr, bab kaifa kanat yamin al-nabiy shalla Allah 'alaih*

- wa sallam*, hadis no. 6145, 6464, 6639, 6658.
- Carole Wade dan Carol Tavris, *Psikologi*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Dawud, Abu. *kitab al-kharraj wa al-imarah wa al-fay, bab fi azraq al-amal*, hadis no. 2554
- Hanna, Nessim. *Cunsumer Behavior: An Applied Research*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Inc, 2001.
- Irawan, Ade dkk, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*, Indonesia Corruption Watch, 2014
- Jarot, D. & Grant, L.V. *Political Behavior: Choice and Perspektive*, London: St. Martin's Press. 1974
- Kara, Muslimin. *Statistik Ekonomi*, (Makassar: UIN alauddin Press, 2013
- Kenneth T. Gallagher oleh DR. P. Hardono Hadi. *Epistemologi filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Leahy, Louis. *Manusia, Sebuah Misteri (Sintesa Filosofis Tentang Makhluk Paradoksal)*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989
- Mar'at. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1982
- Puriyanto, DuwiMandiri *Belajar SPSS: Untuk Analisis Data dan Uji Statistik*, (Yogyakarta: Media Kom, 2008)
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003
- Sunyoto, Danang. *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Al-Turmudzi, *kitab al-ahkam, bab ma ja'a fi al-rasyi wa al-murtasyi fi al-hukm*, hadis no. 1256
- Umar, Husein, *Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Data Statistik kabupaten Gowa 2014*.
- <http://www.luwuraya.net/2013/01/panwas-gowa-money-politic-ia-akan-diproses/>
- <http://aeny07.wordpress.com/2010/10/20/money-politic-ditinjau-dari-differential-association-theory/>.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Gowa](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa)
- <https://artikelpolitik.wordpress.com/2008/07/21/perilaku-pemilih-politik-uang-dan-demokrasi-kita/> diakses pada hari selasa, tanggal 20 Oktober 2015.
- <http://rakyatsulsel.com/gowa-jadi-sasaran-empuk-money-politic-pilgub.html>
- <http://aeny07.wordpress.com/2010/10/20/money-politic-ditinjau-dari-differential-association-theory/>
- <http://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/administrasi-gowa1.jpg>
- <http://sombaopugowa.wordpress.com/about/Gowa,Tribun-Timur.Com>
- <http://klikmakassar.com/2014/05/03/kpu-gowa-di-somba-opu-suara-parpol-dipindahkan-ke-caleg/>